



PERAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MEMFASILITASI ASPIRASI MASYARAKAT DI KOTA BANJAR

Nita Ospia Maharani¹, Dini Yuliani¹, Arie Budiawan¹

¹Universitas Galuh

Email: nitamaharani86@gmail.com

Article Info

Keywords:

*Peran, Sekretariat
DPRD, Aspirasi
Masyarakat.*

Recived 05/07/2023

Accepted 16/07/2023

Available online

15/12/2023

Abstract

Based on the results of research conducted by researchers that the role of the Secretariat of the Regional People's Representative Council in facilitating the aspirations of the people in Banjar City has not been implemented optimally, this can be seen based on problem indicators, namely: the uneven distribution of e-aspiration information to secretariat employees, the limited development of technical guidance followed by general functional and still limited adequate human resources in the use of digitization. This study uses a descriptive qualitative approach. Primary data was obtained from interviews with 8 (eight) informants. Data collection techniques used are observation, interviews, literature study, and documentation. Data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the results of the study that: 1) The results of the study show that the role of the secretariat of the regional people's representative council in facilitating the aspirations of the people in the city of Banjar as a whole has been implemented but not optimal. 2) The obstacles faced are related to the still limited human resources and budgetary aspects, there are limited patterns of relationships that exist between the facilitator and the recipient of the facility, causing miss communication. 3) In an effort to evaluate the facilities that have been provided and add online-based aspiration facilities, as well as improve the quality of human resources for the Secretariat of the Regional People's Representative Council of the City of Banjar.

A. PENDAHULUAN

Pada hakikatnya otonomi daerah diberikan sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD (Marwan. Risma,

Andi. 2019:265). Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten atau kota yaitu : fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan (Pasal 149), dimana ketiga fungsi ini merupakan bagian dari proses operasional dan proses berjalannya suatu pemerintahan daerah. Fungsi legislasi yaitu fungsi DPRD dalam membentuk peraturan daerah, yang sudah menjadi tugas dan kewenangan dari DPRD sebagai perwujudan dari DPRD selaku pemegang kekuasaan legislatif di daerah-daerah. Fungsi Anggaran, dalam hal ini DPRD berfungsi untuk menentukan apakah APBD yang diajukan bisa digunakan atau tidak, serta melakukan perbaikan atau revisi mengenai APBD yang diajukan oleh pimpinan daerah. Fungsi Pengawasan merupakan fungsi dimana, dimana DPRD memiliki fungsi utama sebagai pengawas dan juga pemantau setiap pelaksanaan peraturan daerah yang sudah disepakati bersama dengan pimpinan daerah, serta mengawasi penggunaan anggaran yang sudah disahkan sebelumnya dalam APBD.

Dalam menjalankan fungsi DPRD maka memerlukan sekretaris, maka dibentuklah Sekretariat DPRD sebagaimana tertuang dalam dalam Peraturan Walikota Banjar Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lubis, B. T. (2019) mengemukakan bahwa : “tugas Sekretariat DPRD merupakan tugas yang cukup sulit, karena tugas Sekretariat DPRD memfasilitasi atau membantu anggota DPRD untuk menjalankan 3 (tiga) fungsinya”.

Dalam sistem demokrasi yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan, maka Fungsi penyelenggaraan pemerintahan dimulai dari rakyat yang diwakili oleh DPRD. Oleh karena itu keduanya harus saling bersinergis antara Legislatif dan eksekutif untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis. Karena peran sekretariat dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat penting, maka kinerjanya harus optimal,

sebagai penghubung maka Sekretariat DPRD harus lebih optimal dalam menjalankan perannya.

Sebagai lembaga yang berperan penting dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat di Kota Banjar, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus tetap dijaga dan ditingkatkan lagi kinerjanya dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat serta sebagai penghubung antara masyarakat dengan perwakilan rakyat. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga yang mempunyai tugas tertuang dalam Peraturan Walikota Banjar nomor 73 Tahun 2021.

Sekretariat DPRD Kota Banjar menyediakan fasilitas kepada masyarakat atau kelompok masyarakat untuk mempermudah proses aspirasi dalam membahas permasalahannya dengan komisi dewan terkait dengan menyediakan ruang yang mendukung proses komunikasi disertai dengan pemaparan materi, dan pencarian informasi. Namun dengan adanya kemajuan sistem informasi dan komunikasi, masyarakat pada zaman sekarang selain menggunakan aspirasi secara langsung, mereka juga sudah banyak yang menyuarkan aspirasinya melalui media.

Oleh karena itu maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berperan sebagai fasilitator yaitu membantu masyarakat dalam menyuarkan aspirasinya. Hal ini sejalan dengan pengertian aspirasi yang dikemukakan oleh Liando. Nayoan. (2019:3) yaitu : “Aspirasi adalah harapan dan tujuan keberhasilan pada masa yang akan datang, beraspirasi bercita-cita, berkeinginan, berhasrat serta keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu, seperti keberhasilan dalam tujuan keinginan tersebut”.

Namun berdasarkan hasil observasi di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar masih ditemukan pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang belum berperan di dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari indikator-indikator sebagai berikut :

1. Sekretariat DPRD Kota Banjar dalam menjalankan peran sebagai communicator belum maksimal, hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen surat aspirasi masyarakat yang sudah dibahas dan ditanggapi dalam bentuk dengar pendapat dengan anggota DPRD Kota Banjar yang di fasilitasi oleh Sekretariat DPRD Kota Banjar dengan jumlah 13 surat dan juga di Sekretariat DPRD Kota Banjar terdapat sistem digital yang dikelola oleh bagian Perundang-undangan.

2. Kurang maksimalnya peran Sekretariat DPRD Kota Banjar sebagai pendukung dalam organisasi, khususnya terkait pengembangan tugas pokok dan fungsi bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan. Hal tersebut sesuai dengan observasi awal penulis, masih terbatasnya pengembangan bimtek yang diikuti oleh fungsional umum di Sekretariat DPRD Kota Banjar.
3. Kurang maksimalnya Sekretariat DPRD Kota Banjar dalam menjalankan peran sebagai corporate image, hal ini dapat teridentifikasi dari masih terbatasnya sumber daya pegawai Sekretariat DPRD Kota Banjar yang mampu mengoperasikan penggunaan digitalisasi yang disampaikan oleh masyarakat lewat e-aspirasi. Hal tersebut menghambat pemrosesan dan penanganan aspirasi yang disampaikan kepada anggota DPRD Kota Banjar.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul : “Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Memfasilitasi Aspirasi Masyarakat Di Kota Banjar”.

B. LITERATURE REVIEW

Peran merupakan konsep-konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2003) dalam Riva’I (2016:14) mengemukakan bahwa "Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai, guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsible".

Penjelasan lainnya dikemukakan oleh Ruslan (2015:56) dalam Prilian (2022) yang menyebutkan bahwa 4 (empat) peran utama Publik Relation, diantaranya :

1. Sebagai communicator atau penghubung antara organisasi atau lembaga yang diwakili dengan publiknya.
2. Membina relationship, yaitu berupa membina hubungan yang positif dan saling menguntungkan dengan pihak publiknya.

3. Peran sebagai pendukung dalam organisasi, yaitu sebagai pendukung dalam fungsi manajemen organisasi.
4. Membentuk corporate image, artinya suatu organisasi berupaya untuk menciptakan citra bagi organisasi atau lembaganya.

Savitri. Amaliah (2017:56) mengemukakan Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, UU 27 Tahun 2009, PP No. 41 Tahun 2007 dan Perda No. 20 Tahun 2008, "Sekretariat DPRD adalah sebuah lembaga non departemen yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan mendukung tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, melalui pendampingan perwakilan dari berbagai unit untuk setiap anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas".

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota adalah salah satu unit kerja Lingkup Pemerintah Kota yang mempunyai fungsi menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Sesuai Peraturan Walikota Banjar Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata kerja Sekretariat DPRD Kota Banjar. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sekretariat dewan mempunyai struktur susunan organisasi, agar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tidak kacau balau dan lebih mudah dalam melaksanakan tugasnya.

Tanpa adanya sebuah aspirasi masyarakat maka pembangunan akan bermakna ganda. Pertama, sebagai ajang tipu daya elit politik kepada masyarakat. Kedua, Sebagai perwujudan demokrasi palsu, sebab pembangunan tidak lebih sebagai gagasan dan kepentingan pihak elit belaka. Secara definitive, konsep aspirasi mengandung dua pengertian, aspirasi di tingkat ide dan aspirasi di tingkat peran structural. Di tingkat ide, konsep aspirasi berarti sejumlah gagasan verbal dan lapisan masyarakat manapun. Tingkat peran dalam struktur adalah langsung dalam suatu kegiatan.

Menurut Adianto. As'ari (2016:24) mengemukakan bahwa "Aspirasi masyarakat adalah harapan dan tujuan dari masyarakat untuk keberhasilan pada masa yang akan datang berkaitan dengan hajat hidup mereka, baik secara individu maupun secara kelompok". Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aspirasi

masyarakat adalah suatu keinginan atau harapan dari masyarakat kepada pemerintah untuk perbaikan pemerintahan yang berkaitan dengan individu ataupun kelompok.

C. METODE PENELITIAN

Metode Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu usaha mengumpulkan, menyusun dan menginterpretasikan data yang ada kemudian menganalisa data tersebut, menelitinya, menggambarkan dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi dan fenomena yang diselidiki.

Dari uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang memaparkan seluruh fakta dan peristiwa lapangan dan merupakan serangkaian penelitian yang mencoba untuk mengedepankan proses dengan harapan akan memperoleh hasil penelitian akurat dan bukan rekayasa semata. Dengan demikian, fokus pada penelitian ini adalah mengenai pemaparan seluruh fakta dan peristiwa di lapangan mengenai Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Memfasilitasi Aspirasi Masyarakat Di Kota Banjar.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai sekretariat serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar. Metode pengambilan subjek atau informan digunakan metode purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Ulber Silalahi (2012:339). Tahapan analisis deskriptif kualitatif penelitian di mulai dari langkahlangkah berikut ini :

1. Reduksi Data

Menurut Ulber Silalahi (2012:339) reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerahan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Pada saat wawancara, peneliti membuat suatu catatan. Catatan tersebut dikumpulkan

sampai jenuh, kemudian dipilih catatan yang dianggap paling relevan terkait dengan Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Memfasilitasi Aspirasi Masyarakat di Kota Banjar.

2. Penyajian Data

Menurut Ulber Silalahi (2012:340) penyajian data, yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang paling sering digunakan untuk data kualitatif pada masa yang lalu adalah dalam bentuk teks naratif dalam puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan halaman. Penyajian data diawali dengan memberikan deskripsi hasil penelitian yang telah diklasifikasikan sebelumnya. Dari data yang telah disajikan kemudian dibahas dan ditafsirkan berdasarkan teori-teori yang dipilih oleh peneliti untuk memperoleh gambaran secara jelas mengenai bagaimana Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Memfasilitasi Aspirasi Masyarakat di Kota Banjar.

3. Menarik Kesimpulan

Menurut Ulber Silalahi (2012:340) ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin alur sebab akibat, dan proposisi. Dalam pengolahan data peneliti memberikan makna, tafsiran, argumen pada data yang telah terkumpul dan mencari arti dari penjelasannya untuk disusun ke dalam pola-pola hubungan tertentu yang mudah dipahami dan ditafsirkan kata.

D. HASIL DAN DISKUSI

Mengenai hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan mengacu kepada pedoman wawancara yang disusun mengacu kepada teori menurut Rosady Ruslan (2015:56) dalam Prilian (2022) yang dijadikan ukuran dalam mengukur peran sekretariat dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat di Kota Banjar diuraikan kedalam beberapa indikator pertanyaan dengan hasil sebagai berikut :

1. Sebagai *Communicator*

Adanya suatu kondisi dimana terdapat komunikasi yang terjalin antara publik internal dan komunikasi dengan publik eksternal. Pelaksanaan peran sebagai

Communicator yaitu sebagai penyebar berita ataupun sebagai penyampai pesan dan menciptakan opini publik.

Hambatan yang dihadapi oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar yang berkaitan dengan dimensi peran sebagai *communicator* tentunya tentang pelaksanaan peran dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat, hal ini karena adanya keterbatasan sumber daya manusia Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar dan anggaran dalam pelayanan melalui media online, serta masih terdapat *miss communication* antara masyarakat dalam memahami agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi yaitu dengan lebih mengoptimalkan pada bagaimana evaluasi proses pelayanan aspirasi dapat dilaksanakan secara optimal kepada masyarakat dan disini diperlukan keterlibatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar dalam meningkatkan pemahaman kepada masyarakat terkait agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar agar tidak terdapat *miss communication* antara masyarakat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar.

2. Membina *Relationship*

Dalam membina suatu hubungan dalam pelaksanaan peran berkaitan dengan pola hubungan yang terjalin harmonis dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Maka dalam hal ini publik relation berperan dalam melakukan pendekatan hubungan yang baik antara publik internal maupun dengan publik eksternal. Hal ini mengarah pada adanya upaya untuk menciptakan rasa saling mempercayai dan saling memperoleh manfaat antara lembaga/organisasi dengan publiknya sebagai target dari sasaran pelaksanaan suatu program.

Dalam mewujudkan pola hubungan yang sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat mengenai fasilitas aspirasi masyarakat dengan optimal. Sehingga nantinya citra dari masyarakat mengenai kemampuan dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar dalam melaksanakan tugasnya sebagai fasilitator dapat berjalan.

Hambatan yang dihadapi oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar yang berkaitan dengan dimensi peran *relationship* yaitu dengan adanya keterbatasan pola hubungan yang dapat terbentuk antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar selaku pelaksana dengan masyarakat karena adanya anggapan masyarakat bahwa birokrasi yang ada sangat lambat dan adanya

keterbatasan masyarakat dalam memahami mengenai kondisi dan respon yang diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi yaitu ketika Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar belum mampu untuk meningkatkan hubungan relationship yang tepat dengan masyarakat yang menjadi sasaran fasilitasi, maka diperlukan adanya suatu proses pemberian pemahaman terkait dengan lambatnya dalam menangani dokumen surat yang masuk.

3. Pendukung dalam Organisasi

Peran yang mengacu pada pelaksanaan suatu fungsi manajemen dalam organisasi/lembaga yang didalamnya sebelum menentukan program yang akan dibuat diupayakan untuk menemukan fakta dari permasalahannya (fact finding), membuat perencanaan (planning), adanya komunikasi yang terjalin, dan dalam pelaksanaannya melakukan pengawasan dan evaluasi/pemantauan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, dalam hal kesiapan secara responsif dari sekretaris dalam menerima permintaan fasilitas dengan pendapat ataupun audiensi sudah terlaksana dengan baik dimana setiap ada permintaan dari dewan untuk memfasilitasi aspirasi masyarakat ditanggapi dan disiapkan kebutuhannya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sekretariat dalam melaksanakan peranannya sudah secara responsif ketika mendapat permintaan fasilitasi. Hambatan yang dihadapi sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar berkaitan dengan peran sebagai pendukung dalam organisasi yaitu sumber daya manusia yang memadai di bidangnya. Hal ini dapat terlihat dari terbatasnya pengembangan bimtek yang diikuti fungsional umum terkait pengembangan tugas pokok dan fungsi oleh bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan yang mengakibatkan pemborosan anggaran pada saat sebelum dan sesudah kegiatan reses.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi yaitu dengan mengoptimalkan kegiatan bimtek terkait pengembangan tugas pokok dan fungsi bagian fasilitasi penganggaran dan penganggaran serta evaluasi agar tidak mengulangi kesalahan yang sama agar peran sekretaris sebagai pendukung dalam organisasi tercapai secara optimal.

4. Corporate Image

Dimana dalam membentuk citra organisasi/lembaga merupakan tujuan akhir dari program yang direncanakan. Berdasarkan hasil observasi dilapangan bahwa dalam pelaksanaan fasilitas aspirasi masyarakat sudah dilaksanakan secara optimal, meskipun masih terdapat kendala yang menjadi keterbatasan sekretariat dalam penyelenggaraan fasilitas aspirasi. Sekretariat hanya memfasilitasi aspirasi masyarakat berdasarkan instruksi dari dewan, maka sekretariat tidak bisa menyediakan fasilitas aspirasi lebih jika tidak ada instruksi dari dewan. Dalam hal ini yang menjadi kendala dalam penambahan fasilitas aspirasi masyarakat berbasis online yaitu masih terbatasnya anggaran dalam penyelenggaraannya serta masih kurangnya sumber daya pegawai yang mumpuni di bidangnya.

Berdasarkan hasil uraian diatas yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa, dalam pelaksanaan peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat ini sangat penting untuk dilaksanakan dalam upaya untuk permasalahan penyampaian aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya harus maksimal dan mampu untuk memenuhi keinginan masyarakat bahwa fasilitas yang akan disediakan atau sedang dijalankan mampu membantu dalam mengatasi permasalahan. Adapun terkait hambatan yang terjadi mengenai pelaksanaan fasilitasi aspirasi masyarakat ini berdasarkan hasil observasi dilapangan yaitu belum terkelolanya website Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar sehingga terdapat aspirasi masyarakat yang terhambat dalam pengelolaan aspirasi tersebut, karena terbatasnya sumber daya pegawai dan anggaran dalam pengelolaannya. Sehingga dewan belum menginstruksikan sekretariat untuk mengoperasikan website tersebut secara optimal. Sehingga hal ini yang menjadi hambatan yang akan menghambat dalam pelaksanaan peran oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar.

Hambatan yang ditemui sekretariat terkait dengan dimensi peran dalam membentuk corporate image yang menjadi hambatan itu dalam pelaksanaan fasilitasi yang dilakukan masih adanya keterbatasan dari sekretariat dalam memberikan pemahaman mengenai tugas pokok dan fungsi sekretariat dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat.

Dengan begitu sebagai upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi maka untuk melaksanakannya dengan meningkatkan kualitas fasilitas pelayanan

aspirasi baik online maupun offline, serta diupayakan agar segera mengoperasikan fasilitas aspirasi masyarakat berbasis online.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa peran sekretariat dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat di Kota Banjar belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari belum optimalnya 3 (tiga) dimensi dari 4 (empat) dimensi yang dikemukakan oleh Rosady Ruslan (2015:56) dalam Prilian (2022) diantaranya pada dimensi peran sebagai communicator belum terlaksana secara optimal, pada dimensi peran dalam membina relationship belum terlaksana dengan baik, peran sebagai pendukung dalam organisasi atau perusahaan sudah terlaksana dengan optimal

Hambatan-hambatan yang ditemukan berdasarkan hasil wawancara dan observasi dalam peran sekretariat dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat di Kota Banjar masih terbatas dari sumber daya pegawai dan segi anggaran, adanya keterbatasan tersebut terkait dengan pola hubungan yang terjalin antara fasilitator dengan yang menerima fasilitas belum terlaksana dengan optimal, sehingga masih terdapat miscommunication. Dengan begitu untuk terlaksananya peran sekretariat dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat diperlukan hubungan yang terjalin dengan baik.

Adanya upaya yang dilakukan berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut dengan melakukan evaluasi terhadap fasilitas yang telah disediakan dan menambah fasilitas aspirasi masyarakat berbasis online sebelum media penyampaian aspirasi masyarakat. Serta meningkatkan kualitas sumber daya pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Riva'i, A, Kardian. (2016). Komunikasi Sosial Pembangunan Tinjauan Komunikasi Dalam Pembangunan Sosial. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.

Silalahi, Ulber. (2012) Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT Refika Aditama.

Artikel Jurnal

Adianto, As'ari, Hasim. (2016) Model Penerapan Aspirasi Masyarakat Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*,: 23-32.

Lubis, B, T. (2019). Peran Hubungan Masyarakat Sekretariat DPRD Palembang Dalam Menjalankan Pengelolaan Aspirasi Masyarakat. Skripsi. Universitas Sriwijaya. Palembang.

Marwan. Risma, Andi. (2019). Kedudukan Fungsi Legislasi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Pasca Amandemen UUD 1945. *Jurisprudentie*, 265-275.

Prilian, S. (2022). Peran Dinas Sosial dalam Rehabilitasi Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kecamatan Pataruman Kota Banjar. Skripsi. Universitas Galuh. Ciamis.

Savitri, Peti., Amaliah, Imani, Siti. (2017). Rancang Bangun Sistem Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Infotronika*. Volume 2, No. 1, Juni 2017.

Peraturan Walikota Banjar Nomor 73 Tahun 2021

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014